



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 107 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 107

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN
KUTAWARINGIN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari proses penyusunan perubahan perencanaan kinerja dengan berdasar kepada Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan juga bagian dari tahapan penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Kecamatan Kutawaringin, kami membuka diri terhadap masukan, kritik dan sasaran demi tercapainya kinerja yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025.

Kutawaringin, 23 Juni 2025

Camat Kutawaringin

ttd

ASEP RUSWANDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	11
DAFTAR ISI.....	12
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GAMBAR	14
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang.....	15
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	16
1.3 Maksud dan Tujuan.....	21
1.3.1 Maksud	21
1.3.2 Tujuan	21
1.4 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025	23
2.1 Hasil Evaluasi Renja Kec. Kutawaringin Triwulan I Tahun 2025...	23
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	42
2.3.1 Masalah Pokok Kecamatan Kutawaringin.....	43
2.3.2 Analisis Lingkungan Strategis	45
2.4 Reviu terhadap RKPD Tahun 2025.....	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	57
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kab. Bandung Tahun 2025	57
3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029	57
3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025	62
3.2.1 Keterikatan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 terhadap Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutawaringin.....	62
3.2.2 Tujuan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025	66
3.2 Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025	66
3.3 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran PD	67
3.4 Program dan Kegiatan.....	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	100
4.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.....	100
4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah	101
BAB V PENUTUP	105
5.1 Catatan Penting	105
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	105
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2025	23
Tabel 2.2 – T-C.29 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD	24
Tabel 2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat ..	40
Tabel 2.4 – T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung	41
Tabel 2.5 Hubungan Potensi Daerah, Isu Dinamis dan Isu Strategis PD ..	44
Tabel 2.6 Identifikasi Lingkungan Strategis Kecamatan Kutawaringin	45
Tabel 2.7 – T.C-31 Reviu Terhadap RKPD Tahun 2025	47
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Bandung Tahun 2025	61
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec. Kutawaringin	67
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran	68
Tabel 3.4 – T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Kutawaringin – Kabupaten Bandung	80
Tabel 4.1 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Keterikatan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Fungsi Kecamatan Kutawaringin..... 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan perubahan rencana jangka pendek untuk periode satu tahun yang dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. Berpedoman pada peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Selain itu, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin merupakan penjabaran terhadap perubahan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2025. Perubahan Renja disusun sebagai acuan Kecamatan Kutawaringin dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kutawaringin.

Perubahan Renja berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 merupakan perubahan perencanaan atas hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD. Penyusunan Perubahan Renja diawali oleh penyusunan Rancangan Perubahan Renja yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan bulan berjalan pada tahun 2025. Perumusan Perubahan Renja dilakukan untuk menelaah kembali sandingan antara perencanaan

program, kegiatan dan pagu indikatif dengan realisasi kinerja dan anggarannya. Selain itu, perubahan renja yang disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Perubahan Renja Kecamatan Kutawaringin tahun 2025 memuat analisa perencanaan dan realisasi program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 12);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 65);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
32. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan perencanaan kinerja dengan perkembangan keadaan meliputi asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bandung Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2025 sebagai bahan analisis perubahan perencanaan kinerja tahun 2025.
2. Merumuskan perubahan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kutawaringin yang dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai dengan hasil analisis yang dilaksanakan.
3. Sebagai bahan acuan perubahan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Camat Kutawaringin dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Perangkat Daerah dan penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada bab ini memuat informasi tentang garis besar tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin dan kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025) sampai dengan triwulan I dan capaian Renstra Perangkat Daerah serta kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan telaahan kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutawaringin, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kutawaringin dan rancangan rencana program dan kegiatan berdasarkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan rencana tindak lanjut atas capaian kinerja tahun 2025 yang dituangkan dalam perubahan rencana kerja beserta rancangan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Kecamatan Kutawaringin dalam rangka mencapai target kinerjanya pada tahun 2025 merencanakan anggaran pada Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar Rp. 6.247.117.675,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.156.462.354,00 dengan capaian persentase realisasi anggaran triwulan I sebesar 18,51%. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk merealisasikan perencanaan kinerja semester pertama yang terdiri dari 6 (enam) program yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.1 Ringkasan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kutawaringin – Triwulan I Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Kinerja 2025			Anggaran 2025		
		Target	Realisasi S/D Tw 1	%	Target	Realisasi S/D Tw 1	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	81,00 Poin	80,95 Poin	99,94%	5.364.117.675	1.093.324.554	20,38%
	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	76,75%	86,53%	112,74%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	88 Poin	87,35 Poin	99,26%	330.000.000	-	0,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	12,50%	12,50%	60.000.000	960.000	1,60%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	12,50%	12,50%	95.000.000	23.577.900	24,82%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100%	2,22%	2,22%	283.000.000	3.250.000	1,15%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	12,00%	12,00%	115.000.000	35.349.900	30,74%
RATA - RATA PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TW. 1				13,84%			
JUMLAH					6.247.117.675	1.156.462.354	18,51%

Sumber: Kecamatan Kutawaringin, diolah

Dari Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kutawaringin belum optimal dalam pencapaian kinerja pada tahun 2025. Hal itu terlihat dari persentase rata-rata capaian kinerja program pada periode triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 13,84% dan pada capaian realisasi keuangan triwulan I, Kecamatan Kutawaringin menyerap anggaran kurang dari capaian ideal (25%) yaitu sebesar 18,51%. Data realisasi pelaksanaan Renja tahun 2025 tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 – T-C.29
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
Periode Pelaksanaan: Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.01.0.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	74,25 Poin	73,55 Poin	73,75 Poin	80,95 Poin	109,76%	81 Poin	80,95 Poin	80,95 Poin	109,02%
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	67 Persen	76,48%	76,00%	86,53%	113,86%	76,75 persen	86,53%	86,53%	129,15%
7.01.01.2.01.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	78,95%	92,98%	92,98%
7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
7.01.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16,67%
7.01.01.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16,67%
7.01.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	11 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100,00%	7 Laporan	0 Laporan	19 Laporan	63,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.01.2.01.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Laporan	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
7.01.01.2.01.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	114 Data	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	57 Data	57 Data	57 Data	50,00%
7.01.01.2.02.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	33,33%	77,78%	77,78%
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	82 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	100,00%	18 Orang/bulan	17 Orang/bulan	116 Orang/bulan	156,76%
7.01.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	1 Laporan	9 Laporan	112,50%
7.01.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	0 Dokumen	1 Laporan	13 Laporan	81,25%
7.01.01.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
7.01.01.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	4 Dokumen	0 Dokumen	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
		Prognosis Realisasi Anggaran									
7.01.01.2.05.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	2,63%	67,54%	67,54%
7.01.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34 Paket	57 Paket	#N/A	#N/A	0,00%	17 Paket	0 Paket	57 Paket	167,65%
7.01.01.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	1 Dokumen	15 Dokumen	62,50%
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang	0 Orang	17 Orang	34 Orang	200,00%	17 Orang	0 Orang	34 Orang	66,67%
7.01.01.2.06.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	20,93%	73,64%	73,64%
7.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	0 Paket	7 Paket	87,50%
7.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 Paket	33 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00%	2 Paket	0 Paket	39 Paket	100,00%
7.01.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	22 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	2 Paket	0 Paket	23 Paket	230,00%
7.01.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	842 Paket	1362 Paket	45 Paket	45 Paket	100,00%	45 Paket	14 Paket	1421 Paket	168,76%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	61 Paket	8 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	3 Paket	1 Paket	10 Paket	16,39%
7.01.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	117 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	0 Dokumen	129 Dokumen	268,75%
7.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286 Laporan	118 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100,00%	60 Laporan	12 Laporan	180 Laporan	62,94%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan	100 Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 Persen	25,00%	75,00%	75,00%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	3 Laporan	39 Laporan	81,25%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	26 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	3 Laporan	41 Laporan	85,42%
7.01.01.2.03.0	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 Persen	100%	#N/A	#N/A	0,00%	100 Persen	0,00%	33,33%	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.01.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan	#N/A	#N/A	0,00%	8 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	33,33%
7.01.01.2.07.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	0,00%	66,67%	66,67%
7.01.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	6 Unit	14 Unit	14 Unit	100,00%	43 Unit	0 Unit	20 Unit	90,91%
7.01.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00%	4 Unit	0 Unit	4 Unit	50,00%
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%
7.01.01.2.09.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	67 Persen	76,48%	76,00%	86,53%	113,86%	76,75 persen	86,53%	83,18%	124,15%
7.01.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	14 Unit	#N/A	#N/A	0,00%	0 Unit	0 Unit	14 Unit	58,33%
7.01.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	0	14 Unit	14 Unit	100,00%	11 Unit	2 Unit	16 Unit	44,44%
7.01.01.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	0 Unit	0 Unit	0 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	10 Unit	18 Unit	18 Unit	100,00%	16 Unit	0 Unit	28 Unit	50,91%
7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	0 Unit	4 Unit	100,00%
7.01.02.0.0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	89 Poin	86,35 Poin	87 Poin	87,35 Poin	100,40%	88 Poin	87,35 Poin	87,35 Poin	101,16%
7.1.2.2,01.0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0,00%	#N/A	#N/A	0,00%	-	0,0000%	0,00%	
7.1.2.2,01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait	0 Laporan	0	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0	0	
7.1.2.2,01.2	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0	#N/A	#N/A	0,00%	0 Dokumen	0	0	
7.01.02.2.02.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	0,00%	66,67%	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.02.2.02.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	8,33%
7.01.02.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	4 Laporan	0 Laporan	24 Laporan	100,00%
7.01.02.2.03.0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	-	0,00%	33,33%	33,33%
7.01.02.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	50,00%
7.01.02.2.04.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	0,00%	66,67%	66,67%
7.1.2.2,04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	4 Dokumen	#N/A	#N/A	0,00%	0 Dokumen	0	4 Dokumen	
7.01.02.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	203 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	1 Laporan	0 Laporan	209 Laporan	2612,50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.04.0.0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 %	12,50%	70,83%	70,83%
7.01.04.2.01.0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	0,00%	66,67%	66,67%
7.01.04.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Laporan	0 Laporan	6 Laporan	42,86%
7.01.04.2.01.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	100,00%
7.01.04.2.02.0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	25,00%	75,00%	75,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.04.2.02.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23 Laporan	112 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100,00%	4 Laporan	1 Laporan	124 Laporan	539,13%
7.01.05.0.0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	#N/A	12,50%	70,83%	70,83%
7.01.05.2.01.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	12,50%	70,83%	70,83%
7.01.05.2.01.2	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	66 orang	0 Orang	#N/A	#N/A	0,00%	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%
7.01.05.2.01.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Orang	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.05.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	63 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	100,00%	#N/A	0 Orang	66 Orang	104,76%
7.01.05.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial yang Ditangani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	0 Laporan	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0	0	
7.01.05.2.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12,50%
7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokuimen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	0 Dokumen	24 Dokumen	100,00%
7.01.03.0.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	2,22%	67,41%	67,41%
7.01.03.2.01.0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	6,67%	68,89%	68,89%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.03.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33 Lembaga Kemasyarakatan	186 Lembaga Kemasyarakatan	#N/A	#N/A	0,00%	11 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	186 Lembaga Kemasyarakatan	563,64%
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	133,33%	4 Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	8 Laporan	53,33%
7.01.03.2.03.0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	0%	66,67%	66,67%
7.01.03.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	2 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00%
7.01.03.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	22 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	200,00%	2 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	24 Lembaga Kemasyarakatan	480,00%
7.01.03.2.03.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0	0	
7.01.03.2.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	13 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	4 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	23,08%
7.01.03.2.03.5	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Laporan	0	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.03.2.06.0	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	100 Persen	0	0,00%	0,00%
7.01.03.2.06.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasiila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	170 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	85 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00%
7.01.03.2.06.2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0	0	
7.01.03.2.06.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	170 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	85 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00%
7.01.03.2.06.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0	0	

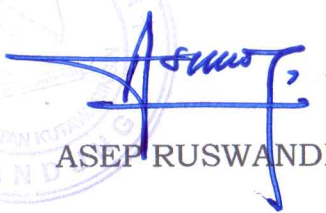
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.03.2.06.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	170 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	85 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00%
7.01.03.2.06.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	170 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	85 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00%
7.01.03.2.06.7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	170 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	85 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00%
7.01.03.2.06.8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	170 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	85 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00%
7.01.03.2.06.9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	170 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	85 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00%
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	170 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	85 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00%
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	170 Keluarga	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	85 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00%
7.01.06.0.0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	12,00%	70,67%	70,67%
7.01.06.2.01.0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100 Persen	12,00%	70,67%	70,67%
7.01.06.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	44 Dokumen	11 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	11 Dokumen	2 Dokumen	14 Dokumen	31,82%
7.01.06.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	44 Dokumen	111 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150,00%	11 Dokumen	0 Dokumen	114 Dokumen	259,09%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.06.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 Dokumen	0	#N/A	#N/A	0,00%	#N/A	0	0	
7.01.06.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	11 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	13 Dokumen	325,00%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	

Sumber: Kecamatan Kutawaringin, diolah.

CAMAT KUTAWARINGIN



ASEP RUSWANDI

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kutawaringin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Kutawaringin yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kutawaringin.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Kutawaringin dituntut untuk melaksanakan fungsi yang sekaligus menjadi pelayanan perangkat daerah kewilayahan yaitu:

- a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Selain 4 (empat) fungsi tersebut, Kecamatan Kutawaringin melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Kutawaringin. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Tabel 2.3 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat

No	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
1.	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
		2. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
2.	KESEHATAN	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
		4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan
		8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7.	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasana yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. Peresemian anggota Badan Permusyawaratan Desa
		15a. Peresemian pemberhentian anggota Badan permusyawaratan Desa
		15b. Memandu pengucapan serta penandatanganan Berita Acara sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa
		15c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
		15d. Klarifikasi Peraturan Desa
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12.	PENANAMAN MODAL	19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan

No	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
14.	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	PARIWISATA	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
16.	PERTANIAN	28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 beserta perubahannya, diolah

Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja Kecamatan Kutawaringin telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat Kutawaringin dengan Bupati Bandung. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kutawaringin tersaji dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4 – T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Nilai AKIP			66,00 Poin	67,00 Poin	74,00 Poin	74,25 Poin	73,55 Poin	80,95 Poin	81,00 Poin	81,10 Poin	Kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik yang diukur dengan nilai AKIP tahun 2024 dipengaruhi faktor meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutawaringin. Faktor pendorong tersebut didukung oleh kinerja-kinerja taktikal antara lain: a. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan. b. Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan. c. Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan. d. Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah sesuai ketentuan. e. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan Atas kinerja-kinerja tersebut, Kecamatan Kutawaringin pada penghargaan sebagai peringkat 1 dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 kategori Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan kinerja operasional yang mendukung terhadap program-program yang dilaksanakan
2	Persentase BMD dalam kondisi baik			65,00 %	65,00 %	66,00 %	67,00 %	76,48 %	86,53 %	76,75 %	77,00 %	Kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik yang diukur dengan persentase BMD dalam kondisi baik tahun 2024 dipengaruhi faktor meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutawaringin. Faktor pendorong tersebut didukung oleh kinerja-kinerja taktikal yaitu dengan terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang sesuai kebutuhan dan ketentuan serta dengan terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan.

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			86,00 Poin	87,00 Poin	88,00 Poin	89,00 Poin	86,35 Poin	87,35 Poin	87,40 Poin	87,50 Poin	meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kutawaringin Tahun 2024 yang diukur melalui capaian nilai IKM dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu a. Faktor pertama, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Kutawaringin dipengaruhi oleh terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di Kecamatan, terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta terlaksananya optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. b. Faktor kedua, yaitu terciptanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakkan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari pengaruh sinergitas dan harmonisasi yang baik antara Kecamatan Kutawaringin dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum dan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan c. Faktor ketiga, yaitu terciptanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjaga 4 (empat) pilar negara dipengaruhi oleh terlaksananya urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah kepada Kecamatan Kutawaringin.
4	Jumlah Desa Cepat Berkembang			8 Desa	8 Desa	9 Desa	11 Desa	8 Desa	9 Desa	9 Desa	11 Desa	Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kutawaringin Tahun 2024 yang diukur melalui realisasi dan capaian jumlah desa cepat berkembang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu a. Faktor pertama, yaitu meningkatnya kualitas pemberdayaan kelembagaan desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. b. Faktor kedua, yaitu meningkatnya perkembangan desa untuk peningkatan pengelolaan administrasi desa dan pengembangan kapasitas aparatur desa tidak terlepas dari pengaruh terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi terhadap isu-isu penting penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kutawaringin didasarkan pada 2 (dua) tugas mendasar yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Permasalahan yang diidentifikasi merupakan penyelerasan antara tujuan dan kewenangan Kecamatan Kutawaringin terhadap upaya kontribusi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan yang terdapat pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025.

2.3.1 Masalah Pokok Kecamatan Kutawaringin

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin yaitu **kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Kutawaringin.**

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan telaahan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029. Terlihat bahwa permasalahan yang mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi adalah permasalahan **keterpaduan antar layanan publik belum optimal / belum optimalnya keterpaduan antara penyelenggaran pelayanan Kecamatan Kutawaringin dengan pelayanan yang diselenggarakan desa dan PD/dinas/badan teknis.**

Selain itu, berdasarkan pada telaahan RTRW dan KLHS dapat diidentifikasi 5 permasalahan. Berdasarkan telaahan tersebut, permasalahan yang mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi adalah **belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang merata: Kebutuhan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur dasar (air bersih, pengelolaan limbah, persampahan) serta pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan.**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen perencanaan strategis, yaitu RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, serta RTRW dan KLHS dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Kutawaringin adalah belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik lintas sektor. Permasalahan ini mencerminkan lemahnya peran Kecamatan sebagai simpul fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis dalam mengoordinasikan layanan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesenjangan dalam penyediaan akses terhadap infrastruktur dasar serta layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup memperkuat urgensi untuk memperbaiki mekanisme koordinasi kelembagaan. Dengan demikian, isu strategis Kecamatan Kutawaringin berujung pada **kurang**

optimalnya peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis, yang berdampak pada belum terwujudnya pelayanan publik kewilayahan yang terintegrasi dan responsif.

Untuk menguji hubungan dan relevansi isu strategis tersebut terhadap isu-isu dinamis yang terjadi, dilakukan pengujian hubungan isu strategis terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan, isu-isu pada KLHS, serta isu global, isu nasional, dan isu Kabupaten Bandung. Pengujian dimaksud tersaji pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Hubungan Potensi Daerah, Isu Dinamis dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Kabupaten Bandung telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan.	Belum terwujudnya pelayanan publik kewilayahan yang terintegrasi dan responsif	Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang merata: Kebutuhan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur dasar (air bersih, pengelolaan limbah, persampahan) serta pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan.	-	Keterpaduan antar layanan publik belum optimal	Implementasi digitalisasi pelayanan masih menghadapi kendala dalam infrastruktur dan kesiapan SDM	Kurang optimalnya peran Kecamatan Kutawaringin sebagai fasilitator antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah teknis
Peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban; Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum (Trantibum) pada Kecamatan merupakan unit <i>ad hoc</i> dari Satpol PP Kab. Bandung yang dikepalai oleh Kepala Seksi Trantibum Kecamatan					Pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum masih memerlukan penguatan	
Program penguatan keamanan dan ketertiban terus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas; Kecamatan berwenang untuk melaksanakan program koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya					Meningkatnya potensi konflik sosial, terutama terkait izin pendirian rumah ibadah	
Sumber daya pertanian dan perkebunan cukup besar, mendukung ketahanan pangan lokal; 81,82% wilayah Kecamatan Kutawaringin berdasarkan luas tanam merupakan pertanian.					Alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi permukiman dan industri	

Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin

2.3.2 Analisis Lingkungan Strategis

Untuk merumuskan suatu strategi dan arah kebijakan dibutuhkan suatu instrumen yang dapat memberikan cara untuk memperkirakan metode terbaik dalam menentukan suatu strategi berdasarkan faktor-faktor penentu kesuksesan. Kecamatan Kutawaringin dalam menentukan strategi menggunakan metode analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats* (SWOT). Analisis SWOT merupakan identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Dalam proses perencanaan dibutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan terlebih dahulu untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan. Dengan analisis SWOT dapat diketahui karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama dan kelemahan tambahan. Tabel 2.6 adalah tabel identifikasi SWOT terhadap lingkungan strategis Kecamatan Kutawaringin.

Tabel 2.6 Identifikasi Lingkungan Strategis Kecamatan Kutawaringin

Faktor Internal			
No	Strengths / Kekuatan [S]	No	Weaknesses / Kelemahan [W]
1	Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang terarah dan selaras mulai dari kebijakan pusat s/d dengan kebijakan daerah	1	Pengetahuan dan wawasan SDM kurang memadai
2	Inovasi - inovasi mulai berjalan dan berdampak positif bagi pemangku kepentingan	2	Etos Kerja kurang maksimal
3	Kepatuhan terhadap prosedur kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	3	Kinerja yang dihasilkan kurang berdampak terhadap penyelesaian isu yang ada
4	Perencanaan kinerja dan anggaran telah selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah	4	Sarana dan prasarana kantor belum memadai
5	Komitmen yang tinggi dari Camat Kutawaringin dalam melaksanakan tugas utama Kecamatan	5	Terjadi ketidaksesuaian antara tupoksi pegawai dengan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai
		6	Belum optimalnya koordinasi internal antar sektor
		7	Monitoring dan evaluasi dari pimpinan terhadap kinerja staff belum optimal

Faktor Eksternal			
No	Opportunities / Peluang [O]	No	Threats / Ancaman [T]
1	Arah kebijakan Pemda yang selaras dengan kebutuhan penyelesaian isu kewilayahan	1	Kolaborasi antara Kecamatan Kutawaringin dengan PD Mitra kurang optimal
2	Dukungan anggaran yang memadai	2	Adanya perubahan anggaran parsial yang terjadi sewaktu-waktu
3	Take Home Pay PNS lebih dari standar	3	Rasionalisasi anggaran
4	Adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai instrumen penilaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutawaringin	4	Jumlah SDM yang kurang dari kebutuhan
5	Komitmen yang tinggi dari Bupati sebagai Kepala Daerah dalam peningkatan kinerja kewilayahan	5	Honorarium Non PNS terlalu rendah
6	SDM berkesempatan meningkatkan komptensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan	6	Perubahan regulasi yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja

Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin

2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 / Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025

Berdasarkan analisis ketercapaian dan kebutuhan terhadap kinerja dan anggaran dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian tolok ukur kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2025. Reviu lengkap terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 – T.C-31
Reviu Terhadap RKPD Tahun 2025
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung

RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kec. Kutawaringin	Nilai AKIP	81,00 Poin	4.765.067.675,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kec. Kutawaringin	Nilai AKIP	81,00 Poin	5.633.781.193,00	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	76,75 Persen				Persentase BMD dalam Kondisi Baik	76,75 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	22.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	24.113.600,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.510.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.489.600,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	17.264.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	57 Data	3.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	57 Data	850.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.590.267.675,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.745.127.281,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutawaringin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	4.583.767.675,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutawaringin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.740.697.681,00	

RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	850.000,00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.579.600,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 Persen	2.550.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 Persen	1.175.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	2.550.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	1.175.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan	100 Persen	40.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan	100 Persen	31.750.600,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	20.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20.000.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	6.200.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	10.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	5.550.600,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan	100 Persen	141.800.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan	100 Persen	205.003.714,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.986.739,00	

RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	120.071.400,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.999.125,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	25.750.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.694.200,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.794.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	30.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	27.898.250,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	5.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.810.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan	100 Persen	272.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan	100 Persen	259.889.948,00	
Pengadaan Mebel	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	75.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	58.512.948,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	6.377.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	195.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	195.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan	100 Persen	234.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan	100 Persen	243.048.350,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.556.350,00	

RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	174.500.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.492.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	76,75 Persen	61.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	76,75 Persen	123.672.700,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.000.000,00	
Pemeliharaan Mebel	Kec. Kutawaringin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kutawaringin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	3.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.520.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	87.152.700,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kutawaringin	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	88 Poin	330.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kutawaringin	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	88 Poin	246.886.800,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0	

RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	25.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	58.825.000,00	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	15.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.910.000,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	55.915.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kutawaringin	-	-	10.000.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kutawaringin	-	-	19.050.600,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	19.050.600,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan	100 Persen	295.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan	100 Persen	169.011.200,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	295.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	169.011.200,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kutawaringin	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan	100 Persen	283.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kutawaringin	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan	100 Persen	165.191.100,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 Persen	40.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 Persen	31.315.300,00	

RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	30.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	25.915.300,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	63.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	56.893.100,00	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	16.208.900,00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.500.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.477.600,00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	7.500.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	7.461.300,00	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	7.745.300,00	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	180.000.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	76.982.700,00	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	85 Keluarga	20.000.000,00	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	85 Keluarga	8.100.300,00	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	85 Keluarga	20.000.000,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	85 Keluarga	8.780.300,00	

RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	85 Keluarga	20.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	85 Keluarga	8.780.300,00	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	85 Keluarga	20.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	85 Keluarga	8.100.300,00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 Keluarga	20.000.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 Keluarga	8.780.300,00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	85 Keluarga	20.000.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	85 Keluarga	8.780.300,00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	85 Keluarga	20.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	85 Keluarga	8.780.300,00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	85 Keluarga	20.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	85 Keluarga	8.100.300,00	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	85 Keluarga	20.000.000,00	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	85 Keluarga	8.780.300,00	

RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kutawaringin	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan	100 %	60.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kutawaringin	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan	100 %	71.557.200,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan	100 Persen	40.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan	100 Persen	39.877.200,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	20.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	19.978.600,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	20.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	19.898.600,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	20.000.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	31.680.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	31.680.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kutawaringin	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	95.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kutawaringin	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	82.801.200,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan	100 Persen	95.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan	100 Persen	82.801.200,00	

RKPD Tahun 2025 / Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kutawaringin	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kutawaringin	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0	
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	50.000.000,00	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	37.431.200,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	45.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	45.370.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kutawaringin	Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa	100 Persen	115.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kutawaringin	Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa	100 Persen	72.078.400,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kutawaringin	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	115.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kutawaringin	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	72.078.400,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	13.650.900,00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	21.507.900,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	36.919.600,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	2.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0,00	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	2.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen	0,00	
JUMLAH				6.247.117.675,00	JUMLAH				6.272.295.893,00	

Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin

Reviu terhadap RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan proses untuk membandingkan antara program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 dengan kebutuhan sumber daya pada rencana kerja perubahan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 untuk mengakomodasi upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Proses ini merupakan metode untuk mengidentifikasi perbedaan antara RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dan menganalisis alasan-alasan perbedaan yang ditemukan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025

3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah:

VISI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih BEDAS: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan

pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak. Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Upaya ini dilakukan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang menyeluruh, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dapat bersaing di tingkat lokal maupun global. Dalam mencapai tujuan ini, penguatan nilai-nilai religius juga ditekankan untuk membentuk individu yang memiliki integritas, etika, dan moral yang tinggi. Selain itu, misi ini juga menitikberatkan pada penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini diwujudkan melalui program-program yang mendukung perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kepemimpinan. Selain itu, misi ini juga mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah

siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur berarti setiap pembangunan dilakukan secara terpadu, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara lingkungan hidup yang terjaga dan infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum. Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa ketertiban umum selalu

terjaga. Program-program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalkan potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung.

Selain itu, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban umum harus terus ditingkatkan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran mereka dalam menjaga ketentraman, kita dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif. Partisipasi aktif dari warga dalam melaporkan tindakan mencurigakan dan mendukung kebijakan keamanan akan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah pondasi untuk mencapai ketentraman yang diinginkan.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Tujuan dan sasaran tersebut merupakan hasil penyelarasan terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan tersebut terjadi pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025

Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesenjangan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	
Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
	Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda
Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan	
Terwujudnya perekonomian yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah
	Menurunnya Tingkat Pengangguran
	Meningkatnya ketahanan pangan lokal yang berkelanjutan

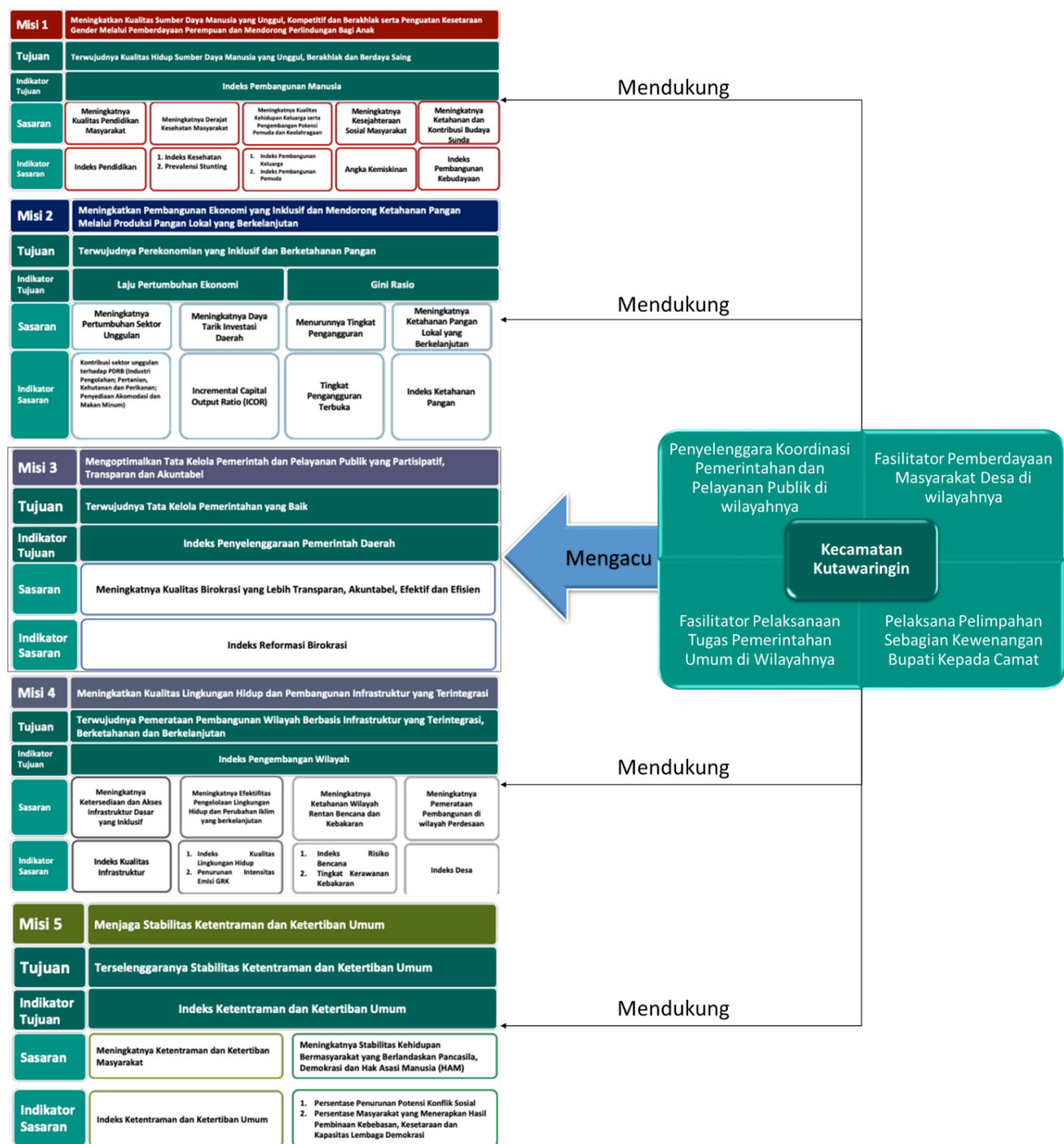
Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan
Misi 3: Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik yang baik	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi	
Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan dan berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar serta Inklusif
	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan
	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran
	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Perdesaan
Misi 5: Menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum	
Terwujudnya stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025

3.2.1 Keterikatan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 terhadap Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutawaringin

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logical framework* Kabupaten Bandung. Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan acuan terhadap arsitektur kinerja yang menggambarkan alur keterkaitan visi dan misi dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gambar 2.12 merupakan gambar keterikatan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin.



Sumber: UU Nomor 23 2014; Perbup Bandung 120 2023; Bapperida Kab. Bandung, diolah

Gambar 3.1 Keterikatan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Fungsi Kecamatan Kutawaringin

Kabupaten Bandung menetapkan 5 (lima) misi dan tujuan pembangunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada periode 2025-2029. Kecamatan Kutawaringin sebagai unit pemerintahan administratif di tingkat bawah, memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui pelaksanaan fungsi-fungsi utamanya.

Memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin serta mempertimbangkan potensi permasalahan pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Kecamatan Kutawaringin

menetapkan acuan utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan strategis Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 yaitu dengan mengacu kepada **misi ke 3, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel**. Tujuan Pembangunan ke 3 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran utama meningkatkan kualitas birokrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebagai penyelenggara koordinasi pemerintahan dan pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan bupati, kecamatan bertanggung jawab memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik di wilayahnya.

Fungsi koordinasi pemerintahan memungkinkan kecamatan mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan dari pemerintah kabupaten dan desa, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara sinergis dan responsif. Melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel, kecamatan menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan administratif yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Selain penetapan acuan utama, tujuan dan sasaran pembangunan lainnya menjadi acuan pendukung. Tujuan dan sasaran lainnya didukung melalui fungsi-fungsi kecamatan sebagai fasilitator penghubung antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten.

Pada tujuan ke-1 yaitu “Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing”, sasaran seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan keluarga, pengembangan potensi pemuda, kesejahteraan sosial, dan ketahanan budaya Sunda, dapat diwujudkan melalui fungsi kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan publik. Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan program-program pendidikan dan kesehatan yang dijalankan oleh desa dan dinas terkait, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya. Dengan koordinasi yang baik, kecamatan memastikan program peningkatan kualitas SDM menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Pada tujuan ke-2 yaitu “Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan”, sasaran pembangunan yang meliputi pertumbuhan sektor unggulan, peningkatan investasi

daerah, penurunan pengangguran, dan ketahanan pangan lokal, dapat didukung oleh kecamatan melalui perannya sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kecamatan mengkoordinasikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM serta mendukung program ketahanan pangan yang dilaksanakan di tingkat desa. Dengan demikian, kecamatan menjadi unit pemerintahan yang turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berlandaskan potensi lokal.

Pada tujuan ke-4 yaitu “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan”, kecamatan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, air bersih, dan sanitasi di wilayahnya. Melalui fungsi koordinasi, kecamatan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan, serta mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Hal ini sejalan dengan sasaran peningkatan ketersediaan infrastruktur inklusif, pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan wilayah rentan bencana, dan pemerataan pembangunan di perdesaan.

Pada tujuan ke-5 yaitu “Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum”, dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, kecamatan menjalankan fungsi koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Kecamatan juga memfasilitasi penyelesaian konflik sosial dan pelaksanaan program-program yang mendukung ketertiban umum. Fungsi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Kecamatan Kutawaringin sebagai penyelenggara koordinasi pemerintahan, penyelenggara pelayanan publik, fasilitator pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara tugas pemerintahan umum, dan pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan bupati sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung 2025-2029. Dengan menjadikan misi dan tujuan Pembangunan ke-3 sebagai acuan utama dan tujuan lainnya sebagai acuan pendukung, Kecamatan Kutawaringin dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengintegrasikan

kebijakan, memfasilitasi pelayanan, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan

3.2.2 Tujuan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Kecamatan Kutawaringin tahun 2025-2029 disusun dengan misi ke-3 Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 sebagai acuan utama, yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien”.

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, telaahan terhadap dokumen perencanaan nasional, kementerian dan daerah serta mempertimbangkan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis, serta dalam rangka menyelesaikan isu strategis maka Kecamatan Kutawaringin menentukan tujuan jangka menengah tahun 2025-2029 yaitu:

<u>TUJUAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2025-2029</u>
--

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”
--

Tujuan ini mencerminkan arah jangka menengah pembangunan wilayah Kecamatan Kutawaringin sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansi, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan integrasi dari tiga peran utama kecamatan, yaitu sebagai simpul koordinasi pemerintahan wilayah, sebagai penyelenggara layanan publik yang dekat dengan masyarakat, serta sebagai katalisator pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri dan partisipatif. Tujuan ini menjadi pijakan dalam menyusun sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan kecamatan secara sistematis dan terukur.

3.2 Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh

dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran strategis merupakan hasil penerjemahan strategi ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai oleh perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, Kecamatan Kutawaringin menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerjanya sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.3

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutawaringin

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin (Persen)	1,16%	0,06 %	0,07 %	0,08 %	0,09 %	0,10 %	0,11 %	Laju IKM= IKM(t)- IKM(t-1)/IKM (t-1)x100%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Kutawaringin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin (Poin)	87,35	87,40	87,46	87,53	87,61	87,70	87,80	PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin

3.3 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.3 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Kutawaringin	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraa Pelayanan Publik Kecamatan Kutawaringin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin					
				Persentase BMD dalam Kondisi Baik					
1.1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin	1. Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja 2. Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku 2. Jumlah Penggunaan Perencanaan Kinerja sebagai Acuan dalam Proses Penganggaran 3. Persentase dokumen pelaporan kinerja. yang disusun sesuai ketentuan 4. Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
1.1.1	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	Melaksanakan penyusunan RKA-SKPD dan Koordinasi penyusunan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	Melaksanakan penyusunan DPA-SKPD dan Koordinasi penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1.1.4	Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.5	Melaksanakan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Terlaksananya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
1.1.6	Melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
1.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran	Persentase dokumen administrasi		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
1.2.1	Memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin	Pengukuran Kinerja	Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2	Menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tepat waktu	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.3	Menyusun laporan keuangan periodik SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1.2.4	Menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.2.5	Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
1.3	Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan	Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan		
1.3.1	Menyediakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	
1.3.2	Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	tersusunnya dokumen koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian sesuai ketentuan	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
1.3.2	Meningkatkan tingkat pengetahuan ASN tentang peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan umum perangkat daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan		
1.4.1	Memenuhi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
1.4.2	Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2. Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan 3. Jumlah Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP sesuai ketentuan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	
1.4.3	Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	
1.4.4	Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.4.5	Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1.4.6	Memenuhi Kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
1.4.7	Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai kebutuhan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.4.8	Menyelenggarakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
1.5	Melaksanakan pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teredianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan		
1.5.1	Memenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.5.2	Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.6	Meningkatkan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
1.6.1	Menyediakan dokumen-dokumen administrasi barang milik daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	(AKIP) Kec. Kutawaringin			sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.7	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan		
1.7.1	Memenuhi kebutuhan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel sesuai kebutuhan	Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
1.7.2	Memenuhi kebutuhan peraltan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1.7.3	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai kebutuhan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
1.8	Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kutawaringin	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
1.8.1	Memenuhi kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2. Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
1.8.2	Memenuhi kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional sesuai kebutuhan dan ketentuan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
1.8.3	Memenuhi kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.8.4	Memenuhi kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutawaringin	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin					
2.1	Meningkatkan sinergitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase kootdinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		
2.1.1	Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD terkait	Terlaksana dan terlaporkannya koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi pemerintahan terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait	
2.1.2	Meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
2.2	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sesuai ketentuan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan		
2.2.1	Melaksanakan percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasi dan terlaporkannya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
2.2.2	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.3	Menciptakan sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
2.3.1	Menciptakan sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
2.4	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan		
2.4.1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha sesuai ketentuan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	
2.4.2	Menyelenggarakan pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutawaringin	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin					
3.1	Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum		
3.1.1	Menciptakan sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
3.1.2	Menciptakan harmonisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
3.2	Menegakkan Perda dan Perkada di lingkungan Kecamatan	Terciptanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
3.2.1	Menciptakan sinergitas dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksana dan Terlaporkannya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutawaringin	Meningkatnya Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin					
4.1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
4.1.1	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Nasional masyarakat Kecamatan Kutawaringin	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional		Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah terhadap Jumlah Penugasan	Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Jumlah Penugasan	Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	
4.1.2	Menciptakan Kerukunan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional di Lingkungan Kecamatan Kutawaringin	Terbinanya masyarakat dalam menciptakan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
4.1.3	Menurunkan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Tertangani dan dilaporkan penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4.1.4	Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
4.1.5	Menyelenggarakan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksana dan dilaporkan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Desa dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kewilayahan, dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang					
5.1	Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		
5.1.1	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
5.1.2	Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.2	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa		
5.2.1	Menyelenggarakan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	
5.2.2	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	
5.2.3	Menyediakan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	
5.2.4	Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
5.2.5	Mengembangkan Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
5.3	Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan		
5.3.1	Membentuk kesadaran masyarakat terhadap penghayatan dan pengalaman Pancasila	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan penghayatan dan pengalaman Pancasila	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamakan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
5.3.2	Meningkatkan kerjasama masyarakat	Meningkatnya kerjasama antar masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
5.3.3	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
5.3.4	Meningkatkan peran masyarakat dalam pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Meningkatnya pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri					Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
5.3.5	Mendorong perwujudan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Meningkatnya kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
5.3.6	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan dan keterampilan	Meningkatnya kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
5.3.7	Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan	Meningkatnya derajat kesehatan keluarga dan lingkungan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
5.3.8	Meningkatkan taraf hidup keluarga	Meningkatnya taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkooperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
5.3.9	Meningkatkan kualitas kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
5.3.10	Meningkatkan ketanggapan keluarga dalam bencana alam	Meningkatnya ketanggapan keluarga dalam bencana alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
5.3.11	Meningkatkan ketanggapan keluarga dalam bencana rumah tangga	Meningkatnya ketanggapan keluarga dalam bencana rumah tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga					Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
5.3.12	Meningkatkan kualitas keluarga	Meningkatnya keterlibatan keluarga dalam perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Ultimate Outcome	Intermediate Outcome	Immediate Outcome	Output	Proses	
6	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang					
6.1	Memfasilitasi Desa dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan		
6.1.1	Meningkatkan kualitas administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	
6.1.2	Meningkatkan kualtias pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.3	Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
6.1.4	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa dengan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
6.1.5	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, Kecamatan Kutawaringin pada perubahan rencana kerja tahun 2025 menetapkan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 6 program, 18 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan total rencana pagu anggaran sebesar Rp. 6.272.295.893,00 dengan sumber dana berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DTU-DAU), dan Dana Transfer Umum Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kutawaringin pada perubahan rencana kerja tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 – T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Kutawaringin – Kabupaten Bandung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					KECAMATAN KUTAWARINGIN				6.272.295.893,00				5.608.738.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.272.295.893,00				5.608.738.000,00
7	0				KECAMATAN				6.272.295.893,00				5.608.738.000,00
7	0	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kutawaringin	Nilai AKIP	81,00 Poin	5.633.781.193,00			81,00 Poin	5.236.165.400,00
							Persentase BMD dalam Kondisi Baik	76,75 Persen				86,65 Persen	
7	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	24.113.600,00			100 Persen	15.000.000,00
7	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		8 Dokumen	4.000.000,00
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.510.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0 Dokumen	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.489.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Dokumen	-
7	0	0	2.	00			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	17.264.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		8 Laporan	10.000.000,00
7	0	0	2.	00			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Dokumen	-
7	0	0	2.	00			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	57 Data	850.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		57 Data	1.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.745.127.281,00			100 Persen	4.701.013.000,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutawaringin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.740.697.681,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		20 Orang/bulan	4.694.488.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	850.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Laporan	2.525.000,00
7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Dokumen	-
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	3.579.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 Persen	1.175.000,00			100 Persen	2.525.000,00
7	0	0	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	1.175.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Laporan	2.525.000,00
7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan	100 Persen	31.750.600,00			100 Persen	9.000.000,00
7	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Paket	
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	6.200.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Dokumen	4.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	5.550.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		20 Orang	5.000.000,00
7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan	100 Persen	205.003.714,00			100 Persen	61.979.576,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.986.739,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Paket	10.500.000,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	120.071.400,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		6 Paket	12.203.276,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.999.125,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Paket	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	25.750.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		45 Paket	8.500.000,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.694.200,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Paket	9.000.000,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.794.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		12 Dokumen	1.800.000,00
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Laporan	-
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	27.898.250,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		50 Laporan	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.810.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	4.976.300,00
7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan	100 Persen	259.889.948,00			100 Persen	11.000.000,00
7	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel	Kec. Kutawaringin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	58.512.948,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		14 Unit	9.000.000,00
7	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	6.377.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Unit	2.000.000,00
7	0	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	195.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Unit	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan	100 Persen	243.048.350,00			100 Persen	381.707.824,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.556.350,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		12 Laporan	60.000.000,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.492.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		12 Laporan	321.707.824,00
7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	76,8 Persen	123.672.700,00			86,65 Persen	53.940.000,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Unit	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		14 Unit	10.000.000,00
7	0	0	2.	00	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kutawaringin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Unit	24.950.000,00
7	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.520.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Unit	8.990.000,00
7	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	87.152.700,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Unit	10.000.000,00
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kutawaringin	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	87,4 Poin	246.886.800,00			88 Poin	88.952.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Persentase keberhasilan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	0 Persen	0,00			100 Persen	10.000.000,00
7	01	02	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait	Kec. Kutawaringin	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	0 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	58.825.000,00			100 Persen	17.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.910.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Laporan	10.000.000,00
7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	55.915.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Laporan	7.500.000,00
7	0	0	2.		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kutawaringin	-	- 0	19.050.600,00			100 Persen	9.952.600,00
7	0	0	2.	00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	19.050.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	9.952.600,00
7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan	100 Persen	169.011.200,00			100 Persen	51.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Dokumen	0,00
7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	169.011.200,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Laporan	51.500.000,00
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kutawaringin	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan	100 Persen	165.191.100,00			100 Persen	141.000.000,00
7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 Persen	31.315.300,00			100 Persen	51.000.000,00
7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasya katan	5.400.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		11 Lembaga Kemasya katan	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	013	01	2.00	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	25.915.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Lembaga Kemasyarakatan	46.000.000,00
7	013	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	56.893.100,00			100 Persen	45.000.000,00
7	013	03	2.00	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	16.208.900,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00
7	013	03	2.00	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.477.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	013	03	2.00	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	7.461.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Laporan	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	7.745.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Laporan	5.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	76.982.700,00			100 Persen	45.000.000,00
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	85 Keluarga	8.100.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		85 Keluarga	10.000.000,00
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	85 Keluarga	8.780.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Keluarga	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.	00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	85 Keluarga	8.780.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		85 Keluarga	10.000.000,00
7	0	0	2.	00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	85 Keluarga	8.100.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		85 Keluarga	10.000.000,00
7	0	0	2.	00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 Keluarga	8.780.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Keluarga	
7	0	0	2.	00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	85 Keluarga	8.780.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Keluarga	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.	00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	85 Keluarga	8.780.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Keluarga	
7	0	0	2.	00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	85 Keluarga	8.100.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		85 Keluarga	7.500.000,00
7	0	0	2.	00	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Kutawaringin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	85 Keluarga	8.780.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		85 Keluarga	7.500.000,00
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kutawaringin	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan	100 %	71.557.200,00			100 %	27.500.000,00
7	0	0	2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kutawaringin	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan	100 Persen	39.877.200,00			100 Persen	17.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	19.978.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Laporan	10.000.000,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	19.898.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Laporan	7.500.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	31.680.000,00			100 Persen	10.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kutawaringin	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	31.680.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Laporan	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kutawaringin	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	82.801.200,00			100 Persen	52.000.000,00
7	0	0	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kutawaringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan	100 Persen	82.801.200,00			100 Persen	52.000.000,00
7	0	0	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kutawaringin	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		0 Orang	-
7	0	0	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	37.431.200,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Dokumen	12.000.000,00
7	0	0	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	45.370.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		4 Dokumen	40.000.000,00
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kutawaringin	Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa	100 Persen	72.078.400,00			100 Persen	63.120.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kutawaringin	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan	100 Persen	72.078.400,00			100 Persen	63.120.000,00
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	13.650.900,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	8.160.000,00
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	21.507.900,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		2 Dokumen	10.200.000,00
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	36.919.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	40.000.000,00
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	2.380.000,00
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Kutawaringin	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen	0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	2.380.000,00
J U M L A H									6.247.117.675,00				5.608.738.000,00

Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 mencerminkan respons strategis terhadap dinamika kebijakan nasional, khususnya instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas dan operasional. Salah satu implikasi langsung dari kebijakan tersebut adalah dilakukannya rasionalisasi signifikan pada beberapa program yang memiliki potensi keberlanjutan meskipun dengan anggaran minimal.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, Kecamatan Kutawaringin melakukan pengurangan alokasi pada kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan, serta fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Meskipun kedua program tersebut secara substansial mendukung pembangunan sosial dan tata kelola desa, namun secara operasional dinilai masih dapat dilaksanakan secara efektif melalui metode efisiensi kegiatan, seperti digitalisasi pelaporan, pengurangan intensitas pertemuan tatap muka, atau integrasi agenda dengan kegiatan lintas bidang. Rasionalisasi ini memungkinkan optimalisasi pencapaian indikator kinerja tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Lebih lanjut, realokasi anggaran juga terjadi pada kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Selain dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi yang sama, kegiatan ini menghadapi hambatan berupa belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang menjadi rujukan teknis pelaksanaan. Tidak adanya NSPK menimbulkan potensi risiko kesalahan prosedural dalam perencanaan capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu, alokasi anggaran hanya diberikan pada unit kegiatan yang telah memiliki dasar regulatif yang jelas untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pada pelaksanaannya.

Dalam konteks tersebut, upaya pergeseran anggaran diarahkan pada penguatan kegiatan fasilitatif, seperti penyediaan sarana prasarana kantor, pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan dokumen perencanaan, dan pelaporan kinerja. Pendekatan ini dipilih agar perangkat kecamatan tetap dapat melaksanakan fungsi-fungsi

dasar pemerintahan secara optimal meskipun secara anggaran mengalami tekanan.

Total anggaran renja mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.178.218,00. Dari sebelum perubahan sebesar Rp. 6.247.117.675,00 menjadi Rp 6,272,295.893,00 atau naik sebesar 0,40% dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Kenaikan anggaran terdapat pada kegiatan:
 - a. Administrasi umum perangkat daerah, bertambah sebesar Rp. 63.203.714,00 atau meningkat sebesar 44,57%.
 - b. Pemeliharaan barang milik daerah, bertambah sebesar Rp. 62.672.700,00 atau meningkat sebesar 102,74%
2. Penurunan anggaran terdapat pada kegiatan
 - a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan, berkurang sebesar Rp. 103.017.300,00 atau berkurang sebesar 57,23%.
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, berkurang sebesar Rp. 125.988.800,00 atau berkurang sebesar 42,71%
 - c. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, berkurang sebesar Rp. 42.921.600,00 atau berkurang sebesar 37,32%.

Secara umum, kebijakan perubahan ini menunjukkan kemampuan adaptasi instansi kecamatan dalam merespons dinamika kebijakan pusat tanpa mengabaikan esensi pelayanan publik. Pilihan rasionalisasi dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan efektivitas pelaksanaan dan urgensi penyusunan regulasi teknis, sementara realokasi diarahkan untuk menjaga kesinambungan fungsi birokrasi pada tataran operasional.

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Setelah menentukan rumusan analisis perubahan terhadap kinerja dan anggaran program yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu strategis, maka dirumuskan perencanaan pendanaan untuk melaksanakan program-program yang dipilih. Total program, kegiatan, subkegiatan beserta besaran anggaran yang diusulkan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kutawaringin
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Pagu Usulan
[1]	[2]	[3]
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	5.633.781.193,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.113.600,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.510.000,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.489.600,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.264.000,00
1.1.5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	850.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.745.127.281,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.740.697.681,00
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	850.000,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.579.600,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.175.000,00
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.175.000,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.750.600,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000,00
1.4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.200.000,00
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.550.600,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.003.714,00
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.986.739,00
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.071.400,00
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.125,00
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.750.000,00
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.694.200,00
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.794.000,00
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.898.250,00
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.810.000,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	259.889.948,00
1.6.1	Pengadaan Mebel	58.512.948,00
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.377.000,00
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.000.000,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.048.350,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.556.350,00
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.492.000,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.672.700,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000,00
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.152.700,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	246.886.800,00
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	58.825.000,00
2.1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.910.000,00
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.915.000,00
2.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	19.050.600,00

No	Program / Kegiatan	Pagu Usulan
[1]	[2]	[3]
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	19.050.600,00
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	169.011.200,00
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	169.011.200,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	165.191.100,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.315.300,00
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.400.000,00
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.915.300,00
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	56.893.100,00
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	16.208.900,00
3.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	25.477.600,00
3.3.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.461.300,00
3.3.4	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.745.300,00
3.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	76.982.700,00
3.3.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	8.100.300,00
3.3.2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	8.780.300,00
3.3.3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	8.780.300,00
3.3.4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	8.100.300,00
3.3.5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8.780.300,00
3.3.6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	8.780.300,00
3.3.7	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	8.780.300,00
3.3.8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	8.100.300,00
3.3.9	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8.780.300,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.557.200,00
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.877.200,00
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.978.600,00
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	19.898.600,00
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	31.680.000,00
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	31.680.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82.801.200,00
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.801.200,00
5.1.1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	37.431.200,00
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45.370.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	72.078.400,00

No	Program / Kegiatan	Pagu Usulan
[1]	[2]	[3]
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.078.400,00
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.650.900,00
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.507.900,00
6.1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36.919.600,00
	Jumlah	6.272.295.893,00

Sumber: Analisis Kecamatan Kutawaringin

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari upaya optimalisasi pencapaian target kinerja tahunan yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, penyusunan dokumen ini juga merupakan langkah sistematis dalam menyesuaikan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan guna memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan secara relevan dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi pada tahun berjalan.

Perubahan Renja ini tidak hanya menjadi instrumen administratif semata, tetapi juga berperan sebagai alat manajerial yang penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Dengan demikian, seluruh perubahan diarahkan untuk menjaga kohesivitas antara perencanaan strategis dan operasional, serta memastikan efektivitas kinerja organisasi secara menyeluruh.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaan amanat dari tujuan pembentukan kecamatan yaitu peningkatan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya. Kecamatan Kutawaringin berkomitmen dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip efektivitas dalam pencapaian kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien, dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan perubahan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, penyusunan perubahan renja mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

Secara spesifik, penyusunan Perubahan Renja ini juga merupakan bagian dari proses penyelarasan terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, sehingga dokumen ini dapat berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan yang selaras dengan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025.

CAMAT KUTAWARINGIN

ttd

ASEP RUSWANDI

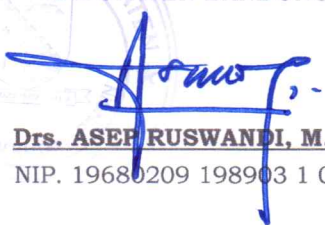
BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja PD Kecamatan Kutawaringin
Kabupaten Bandung Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		✓		
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	✓			

Kutawaringin, 23 Juni 2025
CAMAT KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. ASEP RUSWANDI, M.Si.
NIP. 19680209 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KUTAWARINGIN

Jl.Raya Soreang-Cipatik KM. 5,8 Desa Jatisari Telp. (022) 85873789 . Email :
kec_kutawaringin@bandungkab.go.id Website : www.kecamatankutawaringin.bandungkab.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR 100.3.5./009/662/Sekret

Nama : Drs H. ASEP RUSWANDI M.Si
Jabatan : Camat Kutawaringin

MEMERINTAHKAN

Kepada :
a. Nama : **Terlampir**
b. Jabatan : Terlampir

Hari,Tanggal : Selasa - Senin, 13 Mei 2025 s/d 30 Juni 2025
Tempat : Kecamatan Kutawaringin
Untuk : Melaksanakan tugas sebagai penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025 sebagaimana
Keputusan terlampir

Ditetapkan di Kutawaringin
Pada Tanggal 13 Mei 2025
CAMAT KUTAWARINGIN



Drs H. ASEP RUSWANDI M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196802091989031003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Lampiran 1

Nomor

: 100.3.5./009/662/Sekret

Tanggal

: 13 Mei 2025

Hal

: Surat Perintah - Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025

DAFTAR TERLAMPIR

No	Daftar Telampir
1	DEDE RISNANDAR SULAEMAN S.Sos 197403222010011002 Penata Tingkat I - III/d Sekretaris Kecamatan Kutawaringin Sekretariat Kecamatan
2	USEP SUPRIADI S.Sos. 197807272008011006 Penata - III/c Kepala Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan
3	DRAJAT GANI S.Sos 197704182007011004 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4	ASEP SAEPUL ANWAR 197604272002121002 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Sosial Budaya Seksi Sosial dan Budaya
5	DEDE RISNANDAR SULAEMAN S.Sos 197403222010011002 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	MAMAT RUHIMAT 197002212008011003 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan
7	SYARIF HIDAYAT 197408141998031005 Penata Muda Tingkat I - III/b Pengolah Data Dan Informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat

8	DIDA DARMAWAN 197612262008011004 Penata Muda - III/a Pengolah Data Dan Informasi Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan
9	INDRA IRAWAN S.Sos. 197805312007011006 Penata - III/c Pengolah Data Dan Informasi Seksi Sosial Budaya Seksi Sosial dan Budaya
10	CECENG RUSLAN 197605192008011003 Penata Muda - III/a Operator Layanan Operasional Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11	NANI SUPARTINI 197606202014102001 Penata Muda - III/a Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12	DADAN INDERA MAULANA 197706282014101001 Pengatur - II/c Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13	MUHAMAD SARIFUDIN S.Sos. 197209062009061002 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Program Dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan
14	SATRYADI BURNAMA A.Md. 199110282020121001 Pengatur Tingkat I - II/d Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Program Dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan

Verifikator

Nomor : 100.3.5./009/662/Sekret

Tanggal : 13 Mei 2025

Hal : Surat Perintah - Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025

DAFTAR VERIFIKATOR		
No. Tanggal Verifikasi	Verifikator	Status
1 2025-05-13 12:30:04	DEDE RISNANDAR SULAEMAN S.Sos PLT SEKRETARIS - KECAMATAN	



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN KUTAWARINGIN

Jl.Raya Soreang – Cipatik Km. 8,5 Desa Jatisari Telp/Fax. (022) 85873789 Bandung 40951

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
Nomor : 100.3.3.2/Kep.036-Kec.Kutawaringin/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2025 serta efektivitas dalam upaya pencapaian kinerja perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 17. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 65);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
32. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

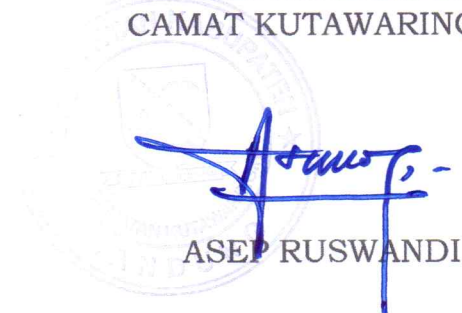
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- c. menyiapkan, menyusun, dan menyajikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Ketiga : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Kutawaringin
pada tanggal 13 Mei 2025

A.N BUPATI BANDUNG
CAMAT KUTAWARINGIN



ASEP RUSWANDI

Keputusan ini disampaikan kepada:

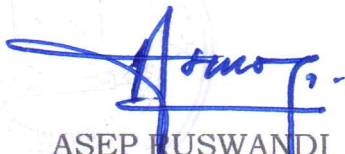
1. Yth. Bupati Bandung;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung;
4. Yth. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bandung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 100.3.3.2/Kep.036-Kec.Kutawaringin/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Camat Kutawaringin
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Kutawaringin
3.	Kelompok Kerja Pembangunan	1. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kutawaringin 2. Pengolah Data dan Informasi pada Seksi Pembangunan – Dida Darmawan
4.	Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kutawaringin 2. Pengolah Data dan Informasi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat – Syarif Hidayat
5.	Kelompok Kerja Sosial dan Budaya	1. Kepala Seksi Sosial dan Budaya Kecamatan Kutawaringin 2. Pengolah Data dan Informasi pada Seksi Sosial dan Budaya – Indra Irawan, S.Sos.
6.	Kelompok Kerja Pemerintahan	1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kutawaringin 2. Jabatan Pelaksana pada Kecamatan Kutawaringin
7.	Kelompok Kerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kutawaringin 2. Operator Layanan Operasional pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum – Ceceng Ruslan
8.	Kelompok Kerja Kesekretariatan	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kutawaringin 2. Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: a. Nani Supartini, S.Sos. b. Dadan Indera Maulana
9.	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi	1. Kepala Sub Program dan Keuangan Kecamatan Kutawaringin 2. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Program dan Keuangan – Muhamad Saripudin, S.Sos. 3. Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Program dan Keuangan – Satryadi Burnama, A.Md.

A.N BUPATI BANDUNG
CAMAT KUTAWARINGIN


ASEP RUSWANDI